

LKJIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN
DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI**



2022

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN 2022



DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI

Jl. Suryakencana No. 41 Kota Sukabumi, telp/ fax : (0266) 221213
email: dinkes_kotsi@sanapati.net



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2022. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi kepada Pemerintah Kota Sukabumi selama satu tahun anggaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah, serta pencapaian target sasaran sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas kinerja yang paripurna. Melalui laporan ini juga memberikan gambaran penerapan *good governance* sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Pada pelaksanaannya, program dan kegiatan diharapkan berdampak terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2022.

Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk menilai hasil pelaksanaan kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi serta menjadi dasar bagi pengambil keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kesehatan di masa yang akan datang.

Demikian laporan ini, kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas terlaksananya penyusunan laporan ini .

Sukabumi, 5 Januari 2023
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Sukabumi

dr. Hj. Rita Fitriningsih, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19640223 199010 2 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2022, merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya kepada Pemerintah Kota dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Selain itu LKjIP Dinas Kesehatan Kota Sukabumi merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/ sasaran strategis. Tujuan/ sasaran strategis tersebut mengacu pada Rencana Strategis Periode Tahun 2018 - 2023.

Rencana strategis ini dilakukan guna mendukung prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi di bidang Kesehatan yaitu **Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas** dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kota Sukabumi tahun 2005 – 2025 yaitu **“Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman Dan Takwa”**. Untuk itu, seluruh program kerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada RPJMD Kota Sukabumi Periode Tahun 2018 - 2023, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Periode Tahun 2018 - 2023, dan Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2022

Dinas Kesehatan Kota Sukabumi telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis utama Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:



Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Pencapaian	Keterangan
I	Mewujudkan Keluarga Sehat					
1	Persentase Keluarga Sehat	Persen	32	32	100 %	Sangat Tinggi
II	Terwujudnya Keluarga Sehat yang Mandiri					
2	Persentase Peningkatan Capaian Keluarga Sehat	Persen	4	4	100 %	Tinggi

Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dilakukan dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan prioritas maupun penunjang yang ditujukan untuk pencapaian visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Terdapat sebanyak 17 (dua puluh dua) kegiatan dan 80 (delapan puluh) sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan berbagai sumber pembiayaan yaitu APBD, DAK, DID, Pajak Rokok, Bantuan Keuangan Provinsi, Kapitasi dan Non Kapitasi, DBHCHT serta BLUD.

(Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Tahun 2023)



DAFTAR ISI

	hal
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.3. Aspek Strategi Organisasi.....	6
1.4. Landasan Hukum	7
1.5. Stuktur Organisasi	9
1.6. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023.....	12
2.2. Indikator Kinerja Utama	33
2.3. Perjanjian Kinerja	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Program dan Kegiatan Tahun 2021.....	37
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)	41
3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Terhadap Penjanjian Kinerja	46
3.4. Akuntabilitas Keuangan	47
3.5. Evaluasi dan Analisis Efisiensi dan Efektifitas Kegiatan	62
BAB IV PENUTUP	



DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2018-2023.....	14
Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra 2018-2023	15
Tabel 2.3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Renstra Tahun 2018-2023	17
Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	33
Tabel 2.5. Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2022	35
Tabel 2.6. Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2022	35
Tabel 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	37
Tabel 3.2. Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022.....	38
Tabel 3.3. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022.....	41
Tabel 3.4. Pencapaian Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2021	46
Tabel 3.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kesehatan Berbagai Sumber di Dinas Kesehatan Kota Sukabumi T.A 2021 dan 2022.....	48
Tabel 3.6. Target dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2022	49
Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Bersumber DAK Bidang Kesehatan T.A 2022	55
Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Bersumber Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022..	61
Tabel 3.9. Analisis Efisiensi dan Efektifitas Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022.....	63



DAFTAR GRAFIK

	hal
Grafik 3.1 Jumlah Status Keluarga di Kota Sukabumi Tahun 2022	43
Grafik 3.2 Indeks Keluarga Sehat per Puskesmas di kota Sukabumi tahun 2022	44
Grafik 3.3 Persentase Capaian Indikator Keluarga Sehat di Kota Sukabumi Tahun 2022	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.....	hal 9
---	----------



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2019 – 2023
- Lampiran 2 Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- Lampiran 3 Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan Tahun 2022



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan sebelumnya yang diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanahkan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, jajaran kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Namun disadari bahwa pembangunan kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain masih terjadinya kesenjangan status kesehatan masyarakat antar wilayah, antar status sosial dan ekonomi, munculnya berbagai masalah kesehatan keluarga, munculnya penyakit baru (*new emerging diseases*), penyakit lama yang muncul kembali (*re-emerging diseases*), serta penyakit lainnya yang masih terjadi.

Pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan yang bersifat *public goods* artinya pelayanan yang harus tersedia dan dapat dijangkau oleh setiap orang untuk memperoleh peluang dan mengembangkan



kemampuan hidup sehat, serta berkewajiban memfasilitasi pengembangan pelayanan kesehatan yang bersifat *private goods* yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk memilih pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Berdasarkan kondisi dan hasil pencapaian pembangunan kesehatan sampai dengan tahun 2022, maka **isu strategis** dan **permasalahan pembangunan kesehatan di Kota Sukabumi** yang masih memerlukan perhatian adalah sebagai berikut:

a. Status keluarga sehat

Keluarga sehat merupakan lingkup terkecil suatu kelompok dalam strata masyarakat yang menjadi tolak ukur suatu wilayah kabupaten/ kota diukur dengan menggunakan Indeks Keluarga Sehat (IKS), penentuan sehat sebuah keluarga dilihat dari 12 indikator yang telah diterapkan oleh Kementerian Kesehatan. Capaian indeks keluarga sehat Kota Sukabumi tahun 2022 sebesar 0,318 yang berarti bahwa sudah 32 % keluarga di Kota Sukabumi dalam Kategori Sehat, adapun 56 % keluarga dalam kategori Pra Sehat dan 12 % kategori tidak sehat. Beberapa indikator yang harus menjadi perhatian adalah pelayanan bagi penderita penyakit hipertensi, tuberkulosis dan orang dengan gangguan jiwa berat perlu strategi yang komprehensif dalam pencegahan dan pengendaliannya. Selain itu perilaku keluarga tidak merokok, mengikuti program KB dan menggunakan jamban sehat perlu dukungan berbagai pihak dalam penanganannya.

b. Angka kematian Ibu

Kematian ibu selama masa kehamilan dan persalinan menjadi salah satu indikator dalam menilai program dan kegiatan dalam pembangunan kesehatan terutama dalam menilai derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu di Kota Sukabumi Tahun 2022 sebesar 54,2 per 100.000 penduduk. Angka ini kurang dari perkiraan yang ditetapkan oleh daerah sebesar 120 per 100.000 penduduk dan target nasional tinggi sebesar 183 per 100.000 penduduk pada Tahun 2024 nanti. Dari angka tersebut dapat dikatakan bahwa pada tahun 2022 angka kematian Ibu di Kota Sukabumi dapat ditekan sebesar 54,8 %.



c. Tingginya penyakit tuberkolosis

Kasus tuberkolosis di Kota Sukabumi masih ditemukan, total suspek yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebanyak 6.023 orang, ditemukan sebanyak 5.709 kasus (94,8%) pada tahun 2022. Masih banyak kasus telah diobati tetapi belum dilaporkan terutama pasien TB yang pindah ke luar kota berpengaruh terhadap angka pengobatan lengkap yang belum mencapai 100%, angka pengobatan lengkap pasien TB untuk tahun 2022 adalah sebesar 65,4 %. Tingginya kasus TB di Kota Sukabumi memerlukan solusi yang terkoordinasi dan komprehensif dengan upaya peningkatan deteksi dengan pendekatan keluarga dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, Menyelesaikan *under-reporting* pengobatan TBC dengan penguatan PPM (*Public Private Mix*), Meningkatkan kepatuhan pengobatan TBC, Perbaiki sistem deteksi MDR TBC (Klinik MDR TBC dengan jejaringnya) dan akses terapi TBC MDR, Edukasi TBC pada masyarakat dan perbaikan perumahan, dan pemenuhan tenaga analis untuk peningkatan sensitivitas diagnostik.

d. Imunisasi

Imunisasi merupakan salah satu strategi pencegahan dan pengendalian penyakit. Imunisasi diberikan untuk meningkatkan kekebalan tubuh suatu kelompok/wilayah terhadap suatu penyakit. Dalam melihat imunisasi berhasil dilaksanakan adalah dengan melihat capaian imunisasi dasar lengkap bagi bayi umur 0 – 1 tahun. Capaian imunisasi dasar lengkap pada tahun 2022 di Kota Sukabumi tercapai sebesar 96,44 % dari target 95%, Mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 dengan capaian IDL 96,92%. Dari 15 Puskesmas yang memberikan pelayanan imunisasi terdapat 4 Puskesmas yang nilai capaian IDLnya masih dibawah 95%, yakni Puskesmas Lembur Situ, Nanggaleng, Selabatu dan Sukabumi. Masih terdapatnya masyarakat yang menolak program imunisasi menjadi salah satu kendala dalam pencapaian target Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) bayi umur 0 – 1 tahun, sehingga pendekatan promosi dan edukasi kepada masyarakat sangat diperlukan. Disamping diperlukannya peningkatan



sarana dan prasarana pendukung program imunisasi serta peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan imunisasi.

- e. Angka kesakitan penyakit tidak menular (PTM) dan cenderung meningkat
Angka kesakitan akibat PTM menunjukkan adanya kecenderungan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu seperti jumlah Hipertensi usia 15 tahun keatas pada Tahun 2022 terlayani sebanyak 22.090 jiwa, 89,54 dari sasaran yang harusnya 100% mendapatkan pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi. Selain itu, data orang dengan gangguan jiwa berat juga mengalami peningkatan, pada tahun 2021 ini terdapat 432 orang yang mengalami gangguan jiwa. Data - data diatas menunjukkan adanya kecenderungan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan membutuhkan perhatian serius dalam upaya pencegahan dan pengendaliannya.

Berdasarkan isu strategis dan permasalahan kesehatan diatas, maka Dinas Kesehatan masih mempunyai tugas yang cukup banyak sehingga dituntut untuk lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam melakukan penanganan masalah kesehatan melalui cara-cara inovatif dan terstruktur dalam pelayanan kesehatan sehingga dapat secara signifikan mendorong upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di Kota Sukabumi.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja dari setiap instansi pemerintah pada setiap periode tertentu sehingga dapat melihat tingkat keberhasilan instansi pemerintah tersebut. Salah satu metode yang dikembangkan dan dijadikan sebagai media pertanggungjawaban adalah berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui sistem tersebut, maka akan sangat mendukung upaya penyelenggaraan *Good Governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap



pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Selain itu, metode ini merupakan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, yang terdiri dari laporan kinerja interim atau triwulan dan laporan kinerja tahunan pada setiap akhir tahun anggaran. Tujuan disusunnya laporan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan suatu wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Kesehatan Kota Sukabumi telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 yang merupakan hasil pengukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan sasaran strategis dalam dokumen RPJMD dan Rencana Strategis yang berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi serta peningkatan kualitas layanan kesehatan dibandingkan periode sebelumnya .

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 60 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1.2.1 Kedudukan

Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Sukabumi.

1.2.2 Tugas Pokok



Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

1.2.3 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang kesehatan.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 telah menetapkan 4 (empat) kebijakan umum pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan publik yang tinggi berbasis ketahanan keluarga.
2. Mewujudkan Tata Ruang dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
3. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada publik perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia publication dan daerah sekitar.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan inovatif

Kebijakan umum pembangunan Kota Sukabumi yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan adalah pada point ke 1 (satu) yaitu Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan public yang tinggi berbasis ketahanan keluarga. Untuk itu fokus pembangunan kesehatan di Kota Sukabumi adalah bagaimana



memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dari berbagai tatanan demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Namun demikian Dinas Kesehatan sebagai instansi pemerintah di Kota Sukabumi siap mendukung dan berpartisipasi aktif dalam melaksanakan seluruh kebijakan pembangunan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

1.4 Landasan Hukum

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi tahun 2022 memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Laporan Kinerja, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sebelumnya telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



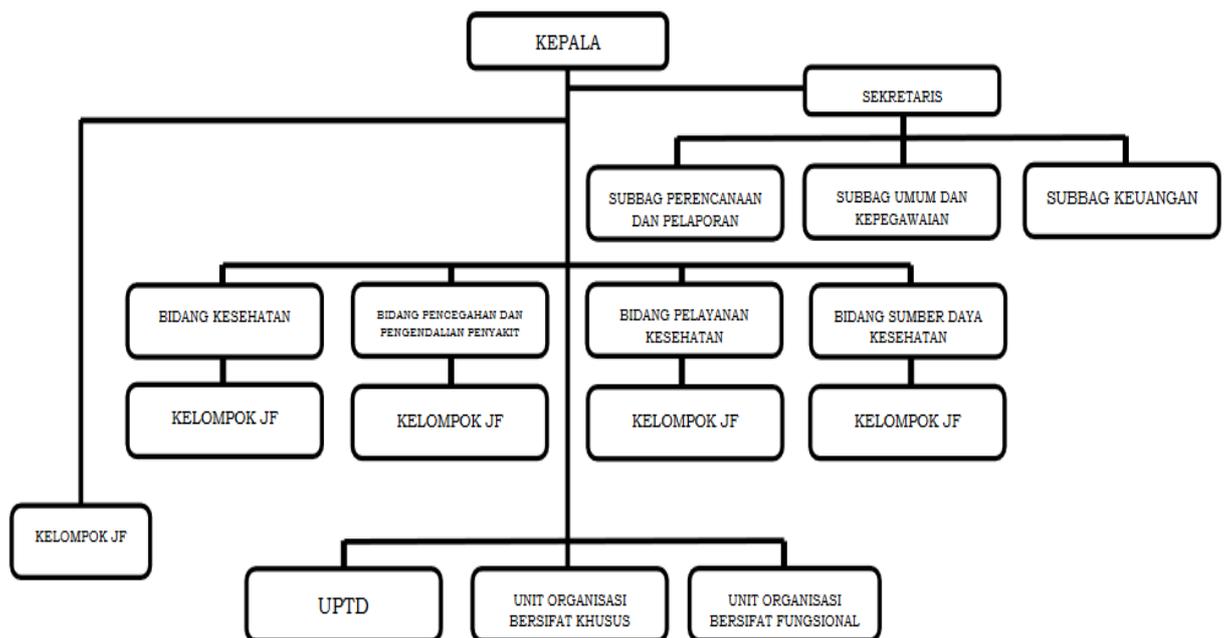
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- 9) Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 10) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 13) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
- 14) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9)
- 15) Peraturan Daerah No. 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
- 16) Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 27);

- 17) Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 32);

1.5 Struktur Organisasi

Organisasi merupakan salah satu fungsi dari administrasi, yang merupakan wadah dari orang-orang atau unit kerja untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sukabumi, Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu seorang Sekretaris dan empat orang Kepala Bidang. Adapun secara lengkap struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Sukabumi (Sumber : Peraturan Walikota Nomor 103 tahun 2021)



1.6 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini akan memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi selama periode Tahun 2022. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2022 tersebut akan dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2022 yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022 yang akan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas penjelasan organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis Dinas Kesehatan serta permasalahan utama yang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2022 dan target pencapaian kinerja dalam RPJMD Kota Sukabumi tahun 2019-2023, serta Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2018-2023.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Kesehatan. Selain itu diuraikan pula realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja



Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2018-2023

Rencana Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis. Rencana Strategis mempunyai fungsi menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar program dan kegiatan maupun antara Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat maupun Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara transparan, efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai pedoman pelaksanaan setiap tahunnya, dan sebagai indikator pengukuran kinerja disusun dokumen Perjanjian Kinerja yang dibuat oleh Kepala Dinas Kesehatan dan ditetapkan oleh Walikota Sukabumi sebagai perjanjian kinerja OPD Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 - 2023;
2. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2018 - 2023;
3. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022;
4. Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2022.



Dinas Kesehatan telah menetapkan Rencana Strategis Periode Tahun 2018-2023 yang dilakukan guna mendukung prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi di bidang Kesehatan yaitu **Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas** dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kota Sukabumi tahun 2005–2025 yaitu **“Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman Dan Takwa”**.

Selain itu, penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan juga mengacu pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi periode tahun 2018 - 2023 yaitu : **“Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera”** yang dijabarkan dalam Misinya, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan publik yang tinggi berbasis ketahanan keluarga;
2. Mewujudkan tataruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada publik perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia publication dan daerah sekitar;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan inovatif.

Dari penjabaran diatas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan difokuskan pada pencapaian Misi ke-1 yaitu : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan yang tinggi berbasis ketahanan keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, Dinas Kesehatan juga menjadi supporting pada pencapaian Misi ke-4 yaitu : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan inovatif.



Berdasarkan Visi dan Misi diatas, maka disusunlah Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator RPJMD yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan No. 57 tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2019 - 2023 sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2018-2023

TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan social yang tinggi berbasis ketahanan keluarga			
Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berahlak Mulia	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat
Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan inovatif			
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks pelayanan publik (IPP)

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Sukabumi telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, yang merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Kesehatan dan berisi tentang Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja beserta kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan beserta strategi dan kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.



Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Sukabumi mengacu pada RPJMD Kota Sukabumi Periode Tahun 2018-2023, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang kesehatan. Tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan Dinas Kesehatan seperti yang tertuang dalam dalam Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Renstra 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
VISI : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS, NYAMAN DAN SEJAHTERA (RENYAH)							
MISI 1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS, KREATIF DAN BERBUDAYA SERTA MEMILIKI KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI BERBASIS KETAHANAN KELUARGA							
1. Mewujudkan keluarga sehat	1.1	Terwujudnya keluarga sehat yang mandiri	1.1.1	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan peran serta masyarakat, swasta dan pemerintah serta kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam mewujudkan keluarga sehat	a.	Peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat, swasta dan pemerintah serta kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam mewujudkan keluarga sehat	
			1.1.2	Meningkatkan layanan kesehatan terhadap ibu, anak, bayi dan lansia serta tercukupinya pemenuhan gizi masyarakat	a.	Peningkatan pelayanan keselamatan ibu, anak, bayi serta lansia	
						b.	Penyediaan makanan tambahan bagi masyarakat kelompok rawan
			1.1.3	Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular berbasis masyarakat	a.	Peningkatan upaya promotif preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif dalam penanganan penyakit menular dan tidak menular dengan berbasis masyarakat	
			1.1.4	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan berbasis masyarakat	a.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat	
			1.1.5	Menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat	a.	Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat	



TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
	1.2	Meningkatnya pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM dalam pelayanan kesehatan	1.2.1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesehatan SDM	a. Peningkatan jumlah dan kemampuan teknis SDM kesehatan
	1.3	Meningkatnya jaminan keamanan pangan bagi kesehatan masyarakat	1.3.1	Meningkatkan pengawasan legalitas makanan	a. Peningkatan jaminan keamanan dan pengawasan pangan dalam rangka melindungi masyarakat
	1.4	Meningkatnya peran serta masyarakat dibidang kesehatan	1.4.1	Meningkatkan peran serta kelompok potensial dalam mendukung kesehatan	a. Peningkatan pemberdayaan kelompok potensial dalam mendukung upaya kesehatan
MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF					
2. Menyediakan sarana dan prasarana organisasi dalam menunjang pelayanan publik	2.1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bidang Kesehatan	2.1.1	Mengelola dan meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan berkualitas	a. Pengelolaan dan peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan berkualitas
	2.2	Meningkatnya kualitas serta sarana dan prasarana pelayanan publik	2.2.1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik
			2.2.1	Menyediakan layanan pelayanan publik terintegrasi	a. Menerapkan sistem pelayanan publik terintegrasi

Keterkaitan antara tujuan, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Renstra tahun 2018-2023 dapat diilustrasikan dengan tabel sebagai berikut:



Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Renstra Tahun 2018-2023

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)
1	2	3	4	6	7	8
Mewujudkan keluarga sehat	Persentase Keluarga Sehat					
		Terwujudnya keluarga sehat yang mandiri	Persentase peningkatan capaian keluarga sehat			
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan
						Cakupan penemuan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular
						Persentase Fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna
						Persentase pemenuhan logistik kesehatan sesuai standar
						Persentase pencapaian program promotif-preventif kesehatan masyarakat
				Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP berkualitas
						Persentase ketersediaan obat, BMHP dan alat kesehatan sesuai kebutuhan
					Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Persentase pemenuhan alat, sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan
					Pembangunan Puskesmas	Persentase pemenuhan alat, sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan
					Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pemenuhan alat, sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan
					Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
					Pengembangan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan alat, sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan
					Pengembangan Puskesmas	Persentase pemenuhan alat, sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)
1	2	3	4	6	7	8
					Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase pemenuhan alat, sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Persentase pemenuhan alat, sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Persentase pemenuhan alat, sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan
						Persentase peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan
						Persentase pemenuhan alat, sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Persentase pemenuhan alat, sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan
					Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan sarana pengendalian penyakit sesuai kebutuhan
					Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan alat kesehatan sesuai standar
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan alat, sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase alat kesehatan yang dilakukan pemeliharaan rutin
					Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan
					Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai kebutuhan
					Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan yang tepat waktu
						Persentase pemenuhan alat, sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan
					Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan alat, sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase alat kesehatan yang dilakukan pemeliharaan rutin



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)
1	2	3	4	6	7	8
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan berkualitas
						Persentase keluarga tidak sehat meningkat kemandiriannya (Keluarga Mandiri Level IV)
						Angka Kematian Ibu
						Angka Kematian Bayi
						Persentase balita stunting
						Persentase rumah sehat
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir sesuai standar
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Balita sesuai standar
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase pelayanan skrining kesehatan pada usia produktif (15-59 Thn)
						Persentase Posbindu PTM
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase lansia yang dilakukan skrining kesehatan
						Persentase Puskesmas yang melaksanakan Puskesmas Santun Lansia Strata Madya
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase pelayanan kesehatan penderita DM
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Persentase orang terduga Tuberkulosis



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)
1	2	3	4	6	7	8
					Terduga Tuberkulosis	mendapatkan pelayanan sesuai standar
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang yang berisiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standart
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah program pengendalian penyakit difasilitasi BOK
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Balita yang Ditimbang Berat Badannya
						Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif
						Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)
						Persentase Ibu Hamil KEK yang Mendapat Makanan Tambahan
						Persentase Balita Kurus yang Mendapat Makanan Tambahan
						Persentase balita underweight
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Tempat Kerja yang menerapkan Kesehatan Kerja
						Jumlah Kelompok / Instansi yang melaksanakan kesehatan olah raga
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kelurahan ODF
						Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar
						Jumlah sarana Air Minum yang di awasi / diperiksa kualitas air minum sesuai standar
					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase perokok yang mendapatkan pelayanan konseling berhenti merokok
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional Paripurna
						Persentase kelurahan yang menerapkan Asuhan Mandiri Taman obat keluarga



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)
1	2	3	4	6	7	8
						Persentase penyehat tradisional mendapatkan pembinaan (STPT)
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	persentase KLB yang ditangani dalam kurun waktu < 24 jam
						Persentase pelayanan kesehatan haji sesuai standar
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase pelayanan kesehatan ODMK
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase penyalahguna heroin yang mendapatkan terapi substitusi metadhone
					Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase Keluarga tidak sehat yang mendapatkan Asuhan keperawatan keluarga
						Persentase Individu yang mendapatkan Askep Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
						Jumlah kelompok berkebutuhan khusus beresiko tinggi masalah kesehatan yang mendapatkan asuhan keperawatan kelompok
					Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentase layanan ambulans SIGAP sesuai kriteria
						Persentase keluarga tidak sehat yang mendapatkan pelayanan kesehatan
						Persentase penanganan krisis kesehatan berkualitas
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Insiden Rate DBD
						Persentase Angka Bebas Jentik (ABJ)
						Persentase penanganan kasus zoonosis sesuai standar
						Persentase penanganan kasus Arbovirosis (sesuai standar)
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan
					Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Persentase pelayanan NAFZA berkualitas di Fasyankes dan sekolah
					Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase penanganan spesimen penyakit potensial KLB sesuai standar



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)
1	2	3	4	6	7	8
						Persentase pemenuhan klaim non kapitasi JKN
					Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kumulatif kelurahan yang menyelenggarakan tatanan Kawasan Sehat
					Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan telemedicine sesuai standar
						Persentase masyarakat penerima bantuan iuran
					Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Persentase fasilitasi penelitian kesehatan berkualitas
						Jumlah program UKM yang diselenggarakan UPT
					Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase klaim KTP/ KK dan bankesos
					Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Puskesmas melaksanakan indikator KBK
						Jumlah Puskesmas yang Membuka Layanan Klinik Sore
						Persentase Masyarakat yang mendapatkan layanan Klinik Sore
					Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah program UKM essensial yang diselenggarakan UPT
						Persentase Masyarakat yang mendapatkan layanan Klinik Sore
						Persentase layanan ambulans SIGAP sesuai kriteria
						Persentase keluarga tidak sehat yang mendapatkan pelayanan kesehatan
						Jumlah UPT labkesda terakreditasi penuh
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Terakreditasi Paripurna
					Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase imunisasi dasar lengkap
					Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase desa/kelurahan UCI
					Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persentase pengelolaan SPGDT sesuai standar
						Persentase masyarakat penerima bantuan iuran
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Persentase UPT yang memiliki sistem informasi kesehatan terintegrasi
					Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah buku profil kesehatan sesuai standar



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)
1	2	3	4	6	7	8
					Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang Membuka Layanan Klinik Sore
						Persentase Masyarakat yang mendapatkan layanan Klinik Sore
						Persentase penerapan sistem informasi kesehatan sesuai standar
					Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah UPT yang memiliki Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet berkualitas
						Persentase peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitas kesehatan terakreditasi paripurna
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah kepatuhan RS melaksanakan sistem informasi rumah sakit
						Jumlah kepatuhan Rumah Sakit melaksanakan pealporan RS online
					Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan Terakreditasi
						Jumlah UPTD, UOBK, UOBF yang menerapkan BLUD
					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah UPT labkesda terakreditasi penuh
						Jumlah Puskesmas Terakreditasi Paripurna
					Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah fasilitas kesehatan yang menggunakan sistem rujukan terpadu (SISRUTE)
		Meningkatnya pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM dalam pelayanan kesehatan	Persentase pemenuhan standar tenaga kesehatan minimal di fasilitas pelayanan kesehatan			
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA		Persentase peningkatan kapasitas SDM Kesehatan



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)
1	2	3	4	6	7	8
				MANUSIA KESEHATAN		
				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase pemenuhan izin praktik tenaga kesehatan tepat waktu dan berkualitas
					Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan
					Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Persentase UPT yang memenuhi standar jumlah ketenagaan
					Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen perencanaan dan distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah dokumen perencanaan dan distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
					Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	persentase UPT yang memiliki dokumen kepegawaian sesuai standar
						Persentase legalitas tenaga kesehatan
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		persentase tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan klinis
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase SDM Kesehatan yang mengikuti peningkatan kompetensi minimal 20 JP
		Meningkatnya jaminan keamanan pangan bagi kesehatan masyarakat	Persentase pengawasan legalitas dan keamanan pangan			
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase pengawasan legalitas dan keamanan obat dan makanan



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)
1	2	3	4	6	7	8
						Persentase pengawasan tempat pengolahan pangan
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase legalitas sarana farmasi dan alkes
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sediaan farmasi yang memenuhi syarat kesehatan
					Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sediaan farmasi yang memenuhi syarat kesehatan
					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sediaan farmasi yang memenuhi syarat kesehatan
				Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		
					Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan	



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)
1	2	3	4	6	7	8
					Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase pangan - industri rumah tangga yang memenuhi syarat
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase pangan yang memenuhi syarat
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah tempat pengelolaan makanan yang diterbitkan sertifikat laik higiene sanitasi
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		Persentase makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat
					Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diterbitkan stiker pembinaan kesehatan
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan		Persentase pangan - industri rumah tangga yang memenuhi syarat



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)
1	2	3	4	6	7	8
				Minuman Industri Rumah Tangga		
					Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase pangan yang memenuhi syarat
					Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Persentase pangan yang memenuhi syarat
		Meningkatnya peran serta masyarakat dibidang kesehatan	Persentase pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase pelayanan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai standar
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pedoman/regulasi/ kebijakan Germas
					Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan penggerakan masyarakat dalam mendukung 5 (lima) kluster Germas
					Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase keluarga yang mendapatkan intervensi Gerakan Hidup bersih dan sehat
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase posyandu aktif
					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Persentase posyandu aktif yang mendapatkan pembinaan oleh kecamatan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bidang Kesehatan	Nilai hasil evaluasi SAKIP					



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)
1	2	3	4	6	7	8
		Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Dinkes
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Dinkes
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA Dinkes
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Dinkes
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA Dinkes
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP, LPPD, LKPJ, Laporan Penerapan SPM
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPIP
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS Dinas Kesehatan yang dibayarkan gaji dan tunjangannya
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi Keuangan Dinas Kesehatan
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi Dinas Kesehatan
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun sesuai standar
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)
1	2	3	4	6	7	8
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan semesteran sesuai standar
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran sesuai standar
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat					
		Meningkatnya kualitas serta sarana dan prasarana pelayanan publik	Persentase pemenuhan kualitas kinerja pelayanan publik di fasilitas kesehatan			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan BMD Dinkes
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan BMD Dinkes
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Penilaian BMD Dinkes
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD Dinkes
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Laporan BMD Dinas Kesehatan
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan BMD Dinkes
					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pemanfaatan BMD Dinkes
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pegawai menyusun SKP tepat waktu
						Jumlah UPT yang melaksanakan pelayanan publik berkualitas
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah dokumen sarana dan prasarana disiplin pegawai
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)
1	2	3	4	6	7	8
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian berkualitas
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian berkualitas
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian berkualitas
					Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian berkualitas
					Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian berkualitas
					Pemindahan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian berkualitas
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian berkualitas
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah UPT yang dilakukan pembinaan pelayanan publik
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Unit kerja yang dilakukan Bimtek Peraturan Perundang-undangan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan prasarana kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan prasarana kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan prasarana kantor
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Puskesmas terfasilitasi BOP
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah pemenuhan prasarana kantor
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu dinas kesehatan
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi Dinas Kesehatan
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip dinamis Dinas Kesehatan



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)
1	2	3	4	6	7	8
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan SPBE dinas kesehatan
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang administrasi
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan operasional/ lapangan
					Pengadaan Alat Besar	
					Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
					Pengadaan Mebel	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah dokumen perencanaan & pengawasan
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa penunjang administrasi yang dibiayai APBD
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa penunjang administrasi yang dibiayai APBD
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa penunjang administrasi yang dibiayai APBD
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa penunjang administrasi yang dibiayai APBD
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana prasarana yang dilakukan pemeliharaan sesuai kebutuhan
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)
1	2	3	4	6	7	8
					Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa, biaya, pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/ lapangan Dinkes
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebelair Dinkes
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya pada Dinkes
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan aset tetap Dinkes
					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pemeliharaan aset tak berwujud Dinkes
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung, peralatan dan kendaraan dinas sesuai kebutuhan
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung, peralatan dan kendaraan dinas sesuai kebutuhan
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung, peralatan dan kendaraan dinas sesuai kebutuhan
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	
				Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase pelayanan BLUD yang diterapkan oleh UOBK, UOBF, UPTD
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD yang dilaksanakan oleh UOBK, UOBF, UPTD
						Tingkat pemenuhan standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS)
						Tingkat pemenuhan standar akreditasi rumah sakit Pendidikan
						Persentase capaian standar pelayanan minimal (SPM) rumah sakit
						Jumlah inovasi
						Persentase pemenuhan SPM rumah sakit



Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome dan kegiatan output)
1	2	3	4	6	7	8
						Persentase pemanfaatan layanan KTP KK
						Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal BLUD

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Sukabumi telah ditetapkan secara berjenjang dengan mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Periode Tahun 2018-2023 dan RPJMD Kota Sukabumi Periode Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan tahun 2019 - 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan No. 79 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2019 - 2023. Adapun IKU untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Penjelasan	Satuan	Target
1	Indeks Keluarga Sehat	Capaian derajat tingkat kesehatan keluarga yang ditinjau dari 12 indikator keluarga sehat	Angka	0,317

2.3 Perjanjian Kinerja

Dinas Kesehatan Kota Sukabumi telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian



Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota selaku Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku Perangkat Daerah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Dinas Kesehatan Kota Sukabumi membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Periode Tahun 2018 - 2023 dan RPJMD Kota Sukabumi Periode Tahun 2018 - 2023. Perjanjian Kinerja menyajikan indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin dicapai, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan, yang juga menjadi indikator pada rencana kinerja tahun 2022 Jumlah indikator kinerja pada Penetapan Kinerja berjumlah 2 (dua) indikator sedangkan indikator kinerja pada Renstra berjumlah 16 (enam belas) indikator. Indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.5
Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
1	2	3		4	
1	Mewujudkan keluarga sehat	1	Persentase Keluarga Sehat	31,7	%
2	Terwujudnya keluarga sehat yang mandiri	2	Persentase peningkatan capaian keluarga sehat	4	%

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan anggaran biaya untuk pendanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja. Pada Tahun 2022 terdapat 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan jumlah alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 451.343.062.331,-. Program tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2022

No.	Program	Pagu Anggaran	Sumber Anggaran
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	2	451.343.062.311	
1	2		
1	2	386.482.037.926	BLUD, APBD
1	2	61.389.674.060	DAK NON FISIK, DAK FISIK, DBHCHT, APBD, DID, PAJAK ROKOK, KAPITASI JKN, NON KAPITASI JKN, BANKEU
1	2	1.904.335.750	DAK NON FISIK, APBD
1	2	1.567.014.575	DAK NON FISIK, APBD, DID



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Kesehatan Kota Sukabumi selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan, berkewajiban untuk melakukan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan selama kurun waktu Tahun 2022 berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kerja, yang tertuang dalam Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Walikota Sukabumi.

Akuntabilitas kinerja dapat dilihat melalui pengukuran kinerja Dinas Kesehatan yang dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan Sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/ dokumen Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/ APBD Tahun berjalan. Selain itu dibandingkan pula realisasi Kinerja Program sampai dengan Tahun berjalan dengan Sasaran (target) kinerja 5 (lima) Tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan.

Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan dilakukan dengan kerangka sebagai berikut :



Tabel 3.1
Kerangka Pengukuran Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	KERANGKA PENGUKURAN	SATUAN
1	Sasaran	Membandingkan target sasaran dengan realisasinya (analisis input-output)	%
2	Kinerja program/kegiatan	Membandingkan target indikator kinerja program/kegiatan dengan realisasinya (analisis hasil, manfaat dan dampak)	% cakupan
3	Penyerapan Anggaran	Membandingkan alokasi anggaran dengan realisasinya untuk menghasilkan target output, hasil dan manfaat yang ditentukan	%

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Area* Dinas Kesehatan sebagai pusat pelayanan jasa terpadu di bidang kesehatan.

Untuk lebih mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja kegiatan, indikator sasaran dan indikator makro maka dipergunakan skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu:

- 91% ≤ 100% : Sangat Tinggi
- 76% ≤ 90% : Tinggi
- 66% ≤ 75% : Sedang
- 51% ≤ 65% : Rendah
- ≤ 50% : Sangat Rendah

3.1 Program dan Kegiatan Tahun 2022

Formulasi tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam implementasinya diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) Tahun. Dari 6 (enam) sasaran dan 3 (Tiga) indikator kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 akan dicapai melalui 5 (lima) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 83 (delapan puluh tiga) sub kegiatan. Tabel sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2
Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja bidang kesehatan	1.1. Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang kesehatan	2.1. Meningkatnya kualitas serta sarana dan prasarana pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				8	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
					15	Fasilitasi Kunjungan Tamu
					16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					17	Pengadaan Aset Tak Berwujud
				18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
24	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
3. Mewujudkan keluarga sehat	3.1. Terwujudnya keluarga sehat yang mandiri	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	25	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
				26	Pembangunan Puskesmas	
				27	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				28	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
				29	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
				30	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	



Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				31 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				32 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
				33 Pengadaan Obat, Vaksin
				34 Pengadaan Bahan Habis Pakai
				35 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				36 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
				38 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
				39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				40 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
				41 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
				42 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
				43 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
				44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
				45 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
				46 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
				47 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
				48 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
				49 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
				50 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				51 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
				52 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				53 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				54 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				55 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
				56 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
				57 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
				58 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
				59 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
				60 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
				61 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				62 Operasional Pelayanan Puskesmas
				63 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
				64 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)



Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					
				65	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				
				66	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				
				67	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				
						68	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
								69	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
				70	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya				
						71	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
								72	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
								73	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
				3.2. Meningkatnya pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM dalam pelayanan kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	74	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	
							75	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
							76	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				3.3. Meningkatnya jaminan keamanan pangan bagi kesehatan masyarakat	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	77	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
							78	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
							79	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
80	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan								
3.4. Meningkatnya peran serta masyarakat di bidang kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					



Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	82	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	83	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diampu oleh beberapa perangkat daerah dengan pengampu utama (*leading sector*) yaitu Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dilihat dari pencapaian indikatornya yaitu Indeks Keluarga Sehat.

INDEKS KELUARGA SEHAT

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Nomor 57 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2019 – 2023 berjumlah 1 (satu) indikator yang dicapai melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.

Tabel 3.3
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2022

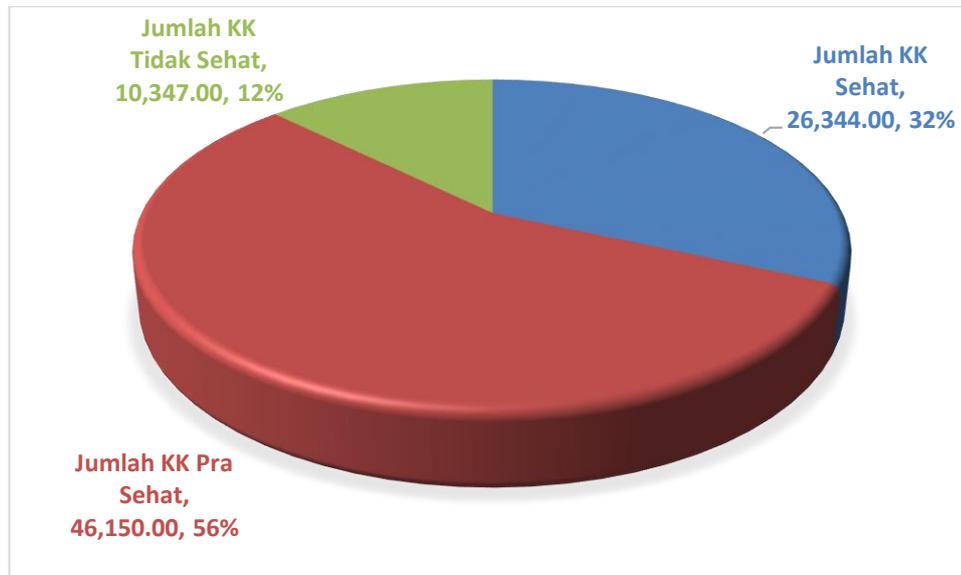
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Pencapaian
1	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0.317	0.32	100,9%



Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan capaian salah satu fokus pembangunan nasional di bidang kesehatan oleh pemerintah pusat yaitu program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga dalam pencapaian keluarga sehat tersebut terdapat 12 (dua belas) indikator yang harus diprioritaskan untuk dilakukan guna meningkatkan status kesehatan masyarakat menjadi keluarga sehat. Kedua belas indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan
6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok
10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Berdasarkan data yang didapatkan bahwa realisasi IKU Dinas Kesehatan yaitu Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Sukabumi Tahun 2022 adalah sebesar 0.318 dari target yang ditetapkan sebesar 0.317. Dengan demikian maka pencapaiannya adalah sebesar 100%.

Grafik. 3.1**Jumlah Status Keluarga di Kota Sukabumi Tahun 2022**

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa penduduk Kota Sukabumi yang termasuk dalam kategori keluarga sehat adalah sebesar 32% atau 26.344 KK dan sisanya sebesar 56 % atau 46.150 KK termasuk kategori keluarga pra sehat serta sebanyak 12 % atau 10.347 KK termasuk kategori tidak sehat.

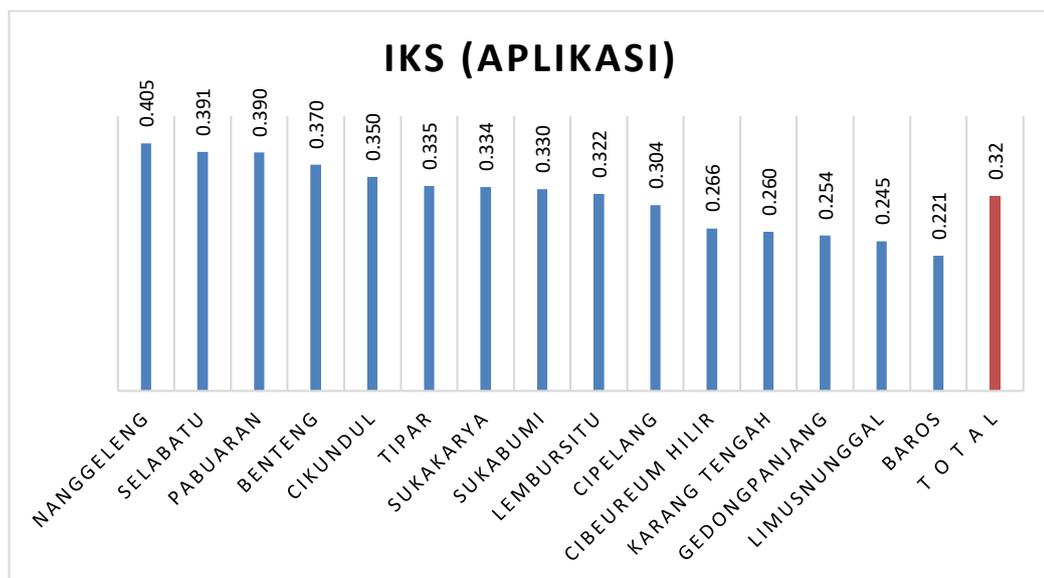
Pencapaian IKS tahun 2022 sudah mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini di dukung oleh banyak sektor antara lain dukungan penuh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kepala Puskesmas, serta semangatnya pemegang program PIS-PK dan tim PJ wilayah di Puskesmas. Adapun beberapa hambatan terkait kunjungan pasien dikarenakan koordinasi lintas program yang terjadi perubahan Definisi Operasional, terlambatnya update data dari Kementerian Kesehatan, Indikator Kinerja Utama (IKU) Walikota Sukabumi merupakan salah satu prioritas. Meskipun ada beberapa hambatan dalam melakukan pendataan dan pengentrian disebabkan karena masa pandemi covid 19 yang terjadi di awal tahun 2020 hingga sepanjang 2022 dan Vaksinasi covid 19 sehingga intervensi / kunjungan rumah pada keluarga pra sehat, tidak sehat tertunda, faktor lain yang berpengaruh adalah adanya pemutahiran / perubahan menu pada aplikasi keluarga sehat versi 2 dari Pusdatin se - Indonesia sehingga berpengaruh terhadap pengembalian data dalam aplikasi, penginputan data tertunda karena tidak bisa mengakses aplikasi selama perbaikan server,



waktu respon yang cukup lama dalam updating data keluarga sehat dan lain sebagainya. Jika di hitung secara manual angka IKS Kota Sukabumi sudah mencapai 3.12 sampai bulan November 2022.

Data capaian indeks keluarga sehat per Puskesmas seperti pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.2
Indeks Keluarga Sehat per Puskesmas
di Kota Sukabumi Tahun 2022



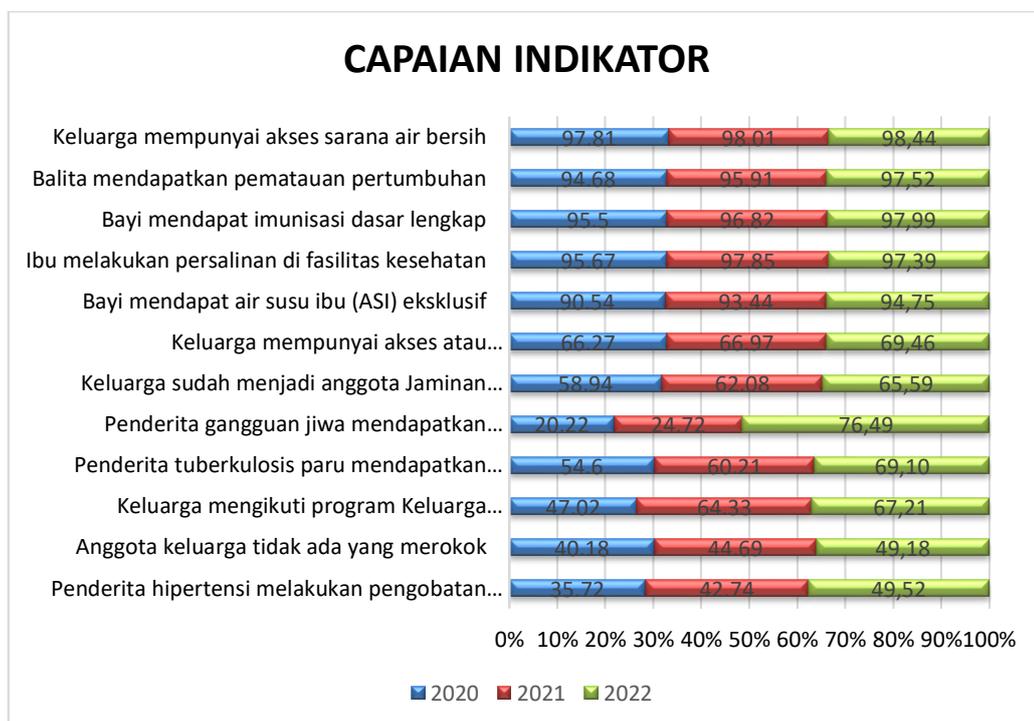
Dari data diatas terlihat bahwa dari 15 (lima belas) Puskesmas yang ada di wilayah Kota Sukabumi, wilayah kerja Puskesmas Nanggeleng mempunyai angka IKS yang cukup tinggi yaitu 0.405, Puskesmas Selabatu 0.391, Puskesmas Benteng 0.370, Puskesmas Nanggeleng 0.36% atau terdapat 36% KK, Puskesmas Cikundul 0.350, Puskesmas Tipar 0.335, Puskesmas Sukakarya 0.334, Puskesmas Sukabumi 0.330, Puskesmas Lembursitu 0.322, Puskesmas Cipelang 0.304, Puskesmas Cibereum Hilir 0.266, Puskesmas Karang Tengah 0.260, Puskesmas Gedongpanjang 0.254, Puskesmas Limusnunggal 0.245, Puskesmas Baros 0.221, yang termasuk kategori keluarga sehat. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu sebesar 0.317, maka terdapat 6 (Enam) Puskesmas yang angka IKS nya belum memenuhi target yaitu : Puskesmas Cipelang, Cibereum Hilir, Karang Tengah, Gedong panjang, Limusnunggal,



Baros. Sedangkan sebanyak 9 (sembilan) Puskesmas mempunyai angka IKS diatas target yang ditetapkan yaitu : Puskesmas Nanggaleng, Selabatu, Pabuaran, Benteng, Cikundul, Tipar, Sukakarya, Sukabumi, Lembursitu. Dari data tersebut maka untuk tahun 2023, harus dilakukan penguatan, pendampingan dan monitoring evaluasi pada 6 (enam) Puskesmas yang memang masih dibawah target yang ditetapkan, penguatan kerjasama tim lintas program, optimalisasi keterlibatan lintas sektor / institusi pendidikan / organisasi perangkat daerah / organisasi profesi / pihak swasta agar dapat berkontribusi dalam intervensi serta peningkatan indikator keluarga sehat. Serta berkoordinasi dengan Pusdatin Kementerian Kesehatan RI dalam hal updating data IKS yang sering terjadi keterlambatan update data IKS. Dan untuk 9 (Sembilan) Puskesmas harus bisa mempertahankan capaian untuk tahun 2023.

Apabila dilihat dari masing-masing indikatornya, maka capaian indikator keluarga sehat di Kota Sukabumi Tahun 2022 seperti pada grafik dibawah ini :

Grafik. 3.3
Persentase Capaian Indikator Keluarga Sehat
di Kota Sukabumi Tahun 2022





Pada grafik diatas terdapat 7 (tujuh) indikator yang masih perlu dorongan antara lain penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga mengikuti program KB, penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak diterlantarkan, keluarga menjadi anggota JKN serta keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban sehat, kesemuanya harus dilakukan intervensi agar indikator tersebut sesuai dengan harapan. Dalam rangka pencapaian indikator kinerja di atas, Dinas Kesehatan tidak bisa hanya berperan sendiri, akan tetapi sangat membutuhkan bantuan dan peran serta dari sektor lain termasuk masyarakat itu sendiri. Untuk itu maka Pemerintah Kota Sukabumi harus memfasilitasi kolaborasi dan sinergitas antar semua sektor yang ada demi terwujudnya visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu semua pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023 harus dipastikan untuk difokuskan terlebih dahulu pada pencapaian IKU dan program prioritas Kota Sukabumi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah pada saat penyusunan Rencana Kerja tahun 2023, dimana harus dilakukan penajaman program dan kegiatan serta koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan program untuk mengutamakan upaya-upaya dalam rangka pencapaian IKU dan program prioritas.

3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja

Pencapaian Indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pencapaian Indikator Perjanjian Kinerja
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Pencapaian
1	Persentase Keluarga Sehat	Persen	31,7	32	100,9
2	Persentase Peningkatan Capaian Keluarga Sehat	Persen	4	4	127,5



Penjelasan evaluasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 diluar Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada RPJMD dan Renstra Dinas kesehatan Tahun 2018 - 2023, adalah sebagai berikut :

Persentase Keluarga Sehat

	Target Pencapaian Sesuai Renstra untuk Tahun 2022	Pencapaian Tahun 2022	Persentase
% KELUARGA SEHAT	28	32	4

% keluarga sehat di Kota Sukabumi pada tahun 2022 adalah 32%, melebihi target yang ditetapkan pada renstra Dinas Kesehatan Kota Sukabumi 2018 – 2023 (Perubahan) sebesar 4%.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Elemen penting akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah, selain pengukuran kinerja juga akuntabilitas keuangan yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Sukabumi pada Tahun Anggaran 2022 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 451.343.062.311,- naik sebesar Rp. 20.732.479.538,- atau sebesar 4,81% dari anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2021 sebesar Rp. 430.610.582.773,- Peningkatan alokasi anggaran tahun 2022 cukup besar, hal tersebut terutama berasal dari sumber anggaran APBD Kota Sukabumi serta BLUD RSUD R Syamsudin, SH. Namun demikian alokasi dari sumber dana lain yaitu DID, serta DBHCHT mengalami kenaikan alokasi anggaran.

Pengelolaan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Anggaran Dinas Kesehatan Kota Sukabumi diperuntukkan khusus untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk kemudian ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2022.

Data perkembangan penganggaran Dinas Kesehatan dari Tahun 2021 sampai dengan 2022 diilustrasikan dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Alokasi dan Realisasi Anggaran Kesehatan Berbagai Sumber
di Dinas Kesehatan Kota Sukabumi T.A 2021 dan 2022

No	Jenis Sumber Biaya	Alokasi/ Target Dan Realisasi Anggaran					
		2021			2022		
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Pendapatan	243,006,424,023	271,101,543,608	111.56	264,624,743,305	280,709,697,727	106.08
II	Belanja						
A	Belanja Tidak Langsung						
B	Belanja Langsung						
1	APBD Kota	85,217,139,456	85,034,753,316	99.79	94,822,620,043	93,610,954,952	98.72
2	DID	14,749,291,774	12,482,602,911	84.63	3,504,359,000	3,288,435,283	93.84
3	Kapitasi JKN	12,723,139,325	11,812,389,642	92.84	12,077,607,000	10,962,479,240	90.77
4	Non Kapitasi JKN	500,000,000	314,296,300	62.86	900,000,000	519,834,700	57.76
5	Bankeu Prov. Jawa Barat	13,845,342,334	13,135,946,470	94.88	7,758,897,517	6,554,239,717	84.47
6	DAK	32,820,253,551	27,985,034,837	85.27	16,378,356,376	13,505,829,216	82.46
7	DBHCHT	3,880,886,000	3,254,430,550	83.86	4,698,284,246	4,559,284,639	97.04
8	Pajak Rokok	7,221,482,200	7,162,869,640	99.19	7,988,367,000	7,908,135,000	99.00
9	BLUD	255,392,929,592	243,881,201,332	95.49	302,750,357,050	295,710,530,501	97.67
10	SILPA Bankeu 2020	2,383,759,162	2,383,759,162	100.00			
11	SILPA DAK Fisik 2020	1,160,000,000	1,089,200,563	93.90	264,214,079	262,222,703	99.25
12	SILPA DAK Non Fisik 2020	716,359,379	716,359,379	100.00			
13	SILPA DID				200,000,000	199,278,550	99.64
Total Belanja APBD		430,610,582,773	409,252,844,102	95.04	451,343,062,311	437,081,224,501	96.84
Total Belanja APBD (non gaji)		356,068,691,033	334,831,327,225	94.04	373,897,700,720	360,293,732,578	96.36
Total APBD Kota Sukabumi		1,070,655,282,207			1.275.593.598.701		
Total Alokasi Dinas Kesehatan bersumber APBD terhadap total APBD (dengan gaji)				40.22			35,38
Total Alokasi Dinas Kesehatan bersumber APBD terhadap total APBD (non gaji)				66.45			29,31



Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran pendapatan tahun 2022 sebesar 106,08% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 264.624.743.305,-, namun demikian realisasi anggaran pendapatan untuk sumber Kapitasi JKN dan Non Kapitasi JKN masih belum mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut bisa disebabkan oleh adanya pengurangan peserta JKN di wilayah Puskesmas terutama yang berasal dari peserta mandiri. Sumber anggaran pendapatan tahun 2022 terdiri dari: hasil retribusi daerah dari UPT Labkesda dan Puskesmas, dana kapitasi JKN, Non Kapitasi JKN serta pendapatan Puskesmas dan BLUD.

Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Sukabumi mendapat alokasi anggaran dari seluruh sumber anggaran sebesar Rp. 451.343.062.311,- dengan realisasi sebesar Rp. 437.081.224.501,- atau sebesar 96,84 %, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 95,04 %. Apabila kita bandingkan dengan jumlah APBD tingkat Kota Sukabumi yaitu sebesar Rp. 1.275.593.598.701,- maka alokasi anggaran untuk Dinas Kesehatan termasuk untuk gaji dan tunjangan adalah sebesar 35,89 % dari total belanja APBD Kota Sukabumi, dengan jumlah sisa anggaran tidak terserap tahun 2022 sebesar Rp. 14.261.837.810,- dengan rincian realisasi program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15
Target dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan
Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Penyerapan		Sumber Anggaran
			Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	386,482,037,926	378,472,797,922	97.93%	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78,350,000	78,350,000	100.00%	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32,935,000	32,935,000	100.00%	APBD Kota Sukabumi
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,000,000	3,000,000	100.00%	APBD Kota Sukabumi
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,740,000	3,740,000	100.00%	APBD Kota Sukabumi



Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Penyerapan		Sumber Anggaran
			Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,925,000	9,925,000	100.00%	APBD Kota Sukabumi
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28,750,000	28,750,000	100.00%	APBD Kota Sukabumi
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77,461,615,516	76,803,745,623	99.15%	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	77,445,361,591	76,787,491,923	99.15%	APBD Kota Sukabumi
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,312,500	7,312,400	100.00%	APBD Kota Sukabumi
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5,865,300	5,865,300	100.00%	APBD Kota Sukabumi
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3,076,125	3,076,000	100.00%	APBD Kota Sukabumi
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	39,717,113	23,617,100	59.46%	
1.02.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	20,000,000	4,950,000	24.75%	APBD Kota Sukabumi
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8,278,013	7,228,000	87.32%	APBD Kota Sukabumi
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11,439,100	11,439,100	100.00%	APBD Kota Sukabumi
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	106,400,000	105,000,000	98.68%	
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	106,400,000	105,000,000	98.68%	APBD Kota Sukabumi
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,634,978,175	1,624,299,208	99.35%	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,620,550	8,594,650	99.70%	APBD Kota Sukabumi
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37,500,000	37,000,000	98.67%	APBD Kota Sukabumi
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	935,580,000	926,845,746	99.07%	APBD Kota Sukabumi
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53,534,500	53,534,500	100.00%	APBD Kota Sukabumi
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50,000,000	49,582,825	99.17%	APBD Kota Sukabumi
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	549,743,125	548,741,487	99.82%	APBD Kota Sukabumi
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,020,870,072	3,746,535,648	93.18%	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000,000	1,000,000	100.00%	APBD Kota Sukabumi
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	417,799,647	340,836,746	81.58%	APBD Kota Sukabumi



Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Penyerapan		Sumber Anggaran
			Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	254,618,025	248,183,500	97.47%	APBD Kota Sukabumi
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,347,452,400	3,156,515,402	94.30%	APBD Kota Sukabumi
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389,750,000	380,719,842	97.68%	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	269,750,000	260,957,673	96.74%	APBD Kota Sukabumi
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,000,000	19,790,000	98.95%	APBD Kota Sukabumi
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,000,000	99,972,169	99.97%	APBD Kota Sukabumi
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	302,750,357,050	295,710,530,501	97.67%	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	302,750,357,050	295,710,530,501	97.67%	BLUD
1.02.02.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	61,389,674,060	55,405,558,104	90.25%	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9,642,833,073	8,515,009,618	88.30%	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	1,262,518,265	1,253,923,566	99.32%	DBHCHT
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,999,484,246	1,986,545,299	99.35%	DBHCHT
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya	200,000,000	199,278,550	99.64%	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	264,214,079	262,222,703	99.25%	DAK Fisik/APBD Kota Sukabumi
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	816,999,372	620,020,323	75.89%	DAK Fisik
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	164,607,735	151,268,390	91.90%	DBHCHT
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	2,300,790,665	1,644,334,352	71.47%	DAK Fisik
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1,457,692,711	1,312,768,541	90.06%	DAK Fisik
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1,069,700,000	978,266,894	91.45%	DBHCHT
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	106,826,000	106,381,000	99.58%	DAK Non Fisik
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50,311,519,987	45,495,184,698	90.43%	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	628,390,000	617,020,000	98.19%	APBD Kota Sukabumi
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	262,316,000	33,965,000	12.95%	APBD Kota Sukabumi & DAK Non Fisik
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	11,195,000	10,660,000	95.22%	APBD Kota Sukabumi
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	208,877,000	205,267,000	98.27%	DAK Non Fisik



Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Penyerapan		Sumber Anggaran
			Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	509,460,000	501,400,000	98.42%	APBD Kota Sukabumi & DAK Non Fisik
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	175,525,000	171,625,000	97.78%	DAK Non Fisik
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	358,839,000	352,715,000	98.29%	APBD Kota Sukabumi & DAK Non Fisik
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	30,300,000	30,300,000	100.00%	APBD Kota Sukabumi
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	90,275,000	87,330,000	96.74%	DAK Non Fisik
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	48,600,000	45,800,000	94.24%	DAK Non Fisik
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	225,600,000	225,600,000	100.00%	APBD Kota Sukabumi & DAK Non Fisik
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1,616,817,800	914,290,000	56.55%	DAK Non Fisik
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2,253,283,000	2,218,301,400	98.45%	DBHCHT, DAK Non Fisik & DAK Fisik
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	232,409,000	218,105,000	93.85%	APBD Kota Sukabumi & DAK Non Fisik
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1,044,386,000	1,022,538,510	97.91%	APBD Kota Sukabumi & DAK Non Fisik
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	260,001,512	258,250,100	99.33%	APBD Kota Sukabumi & DAK Non Fisik
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	17,800,000	17,800,000	100.00%	APBD Kota Sukabumi
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	402,820,000	361,650,820	89.78%	APBD Kota Sukabumi & DAK Non Fisik
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	20,900,000	19,600,000	93.78%	APBD Kota Sukabumi
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	40,300,000	40,300,000	100.00%	APBD Kota Sukabumi
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	2,328,160,900	2,290,290,405	98.37%	APBD Kota Sukabumi
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	712,803,000	678,838,600	95.24%	APBD Kota



Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Penyerapan		Sumber Anggaran
			Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
					Sukabumi & DAK Non Fisik
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23,020,617,897	21,418,636,942	93.04%	APBD Kota Sukabumi/ Pajak Rokok/ DID/ BANKEU
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	136,480,000	136,480,000	100.00%	APBD Kota Sukabumi
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	75,603,628	74,880,000	99.04%	DAK Fisik
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	13,649,607,000	12,152,948,940	89.04%	Kapitasi JKN & Non Kapitasi JKN
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	529,100,000	0	0%	DAK Non Fisik
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	147,255,375	141,052,500	95.79%	APBD Kota Sukabumi
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	772,507,875	748,249,481	96.86%	APBD Kota Sukabumi/ DAK Non Fisik
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	501,290,000	501,290,000	100.00%	DAK Non Fisik
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	882,940,000	857,358,200	97.10%	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	77,800,000	75,989,200	97.67%	APBD Kota Sukabumi
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	705,140,000	681,675,000	96.67%	APBD Kota Sukabumi
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	100,000,000	99,694,000	99.69%	DAK Fisik & Pajak Rokok
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	552,381,000	538,005,588	97.40%	
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	35,000,000	35,000,000	100.00%	APBD Kota Sukabumi
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	62,600,000	60,058,750	95.94%	APBD Kota Sukabumi
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	234,781,000	222,946,838	94.96%	APBD Kota Sukabumi
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	220,000,000	220,000,000	100.00%	APBD Kota Sukabumi
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1,904,335,750	1,643,962,600	86.33%	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1,872,415,000	1,612,042,000	86.09%	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1,735,992,000	1,495,619,000	86.15%	DAK Non Fisik



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Penyerapan		Sumber Anggaran
			Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	136,423,000	116,423,000	85.34%	APBD Kota Sukabumi
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31,920,750	31,920,600	100.00%	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31,920,750	31,920,600	100.00%	APBD Kota Sukabumi
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1,567,014,575	1,558,905,875	99.48%	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	159,128,750	151,462,550	95.18%	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	159,128,750	151,462,550	95.18%	APBD Kota Sukabumi/ DAK Non Fisik
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17,535,000	17,535,000	100.00%	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	17,535,000	17,535,000	100.00%	APBD Kota Sukabumi
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,390,350,825	1,389,908,325	99.97%	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1,390,350,825	1,389,908,325	99.97%	APBD Kota Sukabumi/ DAK Non Fisik
JUMLAH		451,343,062,311	437,081,224,501	96.84%	

Dari tabel diatas dapat dilihat kegiatan-kegiatan yang memiliki penyerapan anggaran yang rendah (<60%) yaitu :

1. Sub kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
2. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa.
4. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Adapun penyerapan anggaran dari APBN dan APBD I dijelaskan pada pembahasan sebagai berikut :



Alokasi dan Realisasi Anggaran Bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan.

Dinas Kesehatan pada Tahun 2021 mendapat anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan yang terdiri dari lima sub bidang, yaitu DAK Fisik, DAK Non Fisik, DAK Rujukan serta DAK Luncuran. DAK Fisik terdiri dari DAK Pelayanan Dasar, Pelayanan Rujukan, Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai, Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta Peningkatan Kapasitas Sistem Kesehatan yang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Penyediaan Prasarana Puskesmas, Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Labkesda, Penyediaan Obat dan BMHP. Untuk kegiatan DAK Non Fisik dialokasikan untuk : Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dan Dinas, Akreditasi Puskesmas, Jampersal, Kalibrasi alat kesehatan dan BOK Kefarmasian. DAK Rujukan diperuntukkan pengadaan Alat Kesehatan dan sarana prasarana RSUD Al-Mulk dan RSUD R Syamsudin, SH serta DAK Luncuran untuk Pembangunan/ Rehabilitasi Puskesmas, pengadaan sarana dan prasarana puskesmas serta peningkatan Kesehatan Masyarakat.

Alokasi anggaran kegiatan bersumber DAK Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 32,820,253,551,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27,985,034,837,- atau sebesar 85 %. Belum maksimalnya penyerapan anggaran DAK ini dikarenakan rendahnya penyerapan DAK fisik untuk pengadaan prasarana listrik di RSUD Al-Mulk sehubungan adanya kesalahan dalam proses penganggaran.

Untuk lebih jelasnya mengenai alokasi dan realisasi kegiatan bersumber DAK bidang Kesehatan dapat dilihat dari tabel dibawah:

**Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Sukabumi
Bersumber DAK Bidang Kesehatan T.A 2022**

NO	SUB BIDANG/ MENU KEGIATAN/ DETAIL KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	%
6	2	3	4	5
	TOTAL DAK	15.393.977.117	11.818.927.272	76,78
	I. DAK FISIK	5.051.607.117	3.357.281.272	66,46
I.1	PENGUATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI	345.180.000	345.180.000	
	Telekonsultasi	345.180.000	345.180.000	
	USG 2D Digital	270.300.000	270.300.000	



Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2022

NO	SUB BIDANG/ MENU KEGIATAN/ DETAIL KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	%
6	2	3	4	5
	02737 - KARANG TENGAH	135.150.000	135.150.000	100
	02739 - SUKABUMI	135.150.000	135.150.000	100
	Sistem Informasi	74.880.000	74.880.000	
	02737 - KARANG TENGAH	37.440.000	37.440.000	100
	02739 - SUKABUMI	37.440.000	37.440.000	100
I.2	PENGUATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	1.384.680.000	944.680.000	
	Penguatan promosi, surveilans dan tata laksana gizi	1.384.680.000	944.680.000	
	Penyediaan alat antropometri	1.384.680.000	944.680.000	
	02725 - BAROS	94.410.000	64.410.000	68,22
	02726 - LEMBURSITU	94.410.000	64.410.000	68,22
	02727 - CIKUNDUL	94.410.000	64.410.000	68,22
	02728 - CIBEUREM HILIR	94.410.000	64.410.000	68,22
	02729 - LIMUS NUNGGAL	94.410.000	64.410.000	68,22
	02730 - TIPAR	94.410.000	64.410.000	68,22
	02731 - GEDONG PANJANG	88.116.000	60.116.000	68,22
	02732 - NANGGELENG	88.116.000	60.116.000	68,22
	02733 - BENTENG	94.410.000	64.410.000	68,22
	02734 - PABUARAN	88.116.000	60.116.000	68,22
	02735 - SUKAKARYA	88.116.000	60.116.000	68,22
	02736 - CIPELANG	94.410.000	64.410.000	68,22
	02737 - KARANG TENGAH	94.410.000	64.410.000	68,22
	02738 - SELABATU	88.116.000	60.116.000	68,22
	02739 - SUKABUMI	94.410.000	64.410.000	68,22
I.3	PENGENDALIAN PENYAKIT	706.089.119	706.089.119	
	Bahan Habis Pakai (BHP)	706.089.119	706.089.119	
	R0 dan BHP skrining HIV dengan Reagen Sifilis	103.600.219	103.600.219	100
	Cartridge TCM	506.800.000	506.800.000	100
	BMHP gula darah	95.688.900	95.688.900	100
I.4	PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	349.720.323	215.349.294	
	Penyediaan alat kesehatan Puskesmas	349.720.323	215.349.294	
	Set gawat darurat termasuk EKG	106.761.561	89.712.323	84,03
	02732 - NANGGELENG	106.761.561	89.712.323	
	Set pemeriksaankesehatan ibu dan Anak termasuk IVA test	42.155.228	34.954.752	82,92
	02732 - NANGGELENG	42.155.228	34.954.752	
	Set obsgyn	27.587.282	13.680.000	49,59
	02732 - NANGGELENG	27.587.282	13.680.000	
	Set kegawatdaruratan maternal dan neonatal	58.077.967	5.045.000	8,69
	02732 - NANGGELENG	58.077.967	5.045.000	
	Set perawatan pascapersalinan	51.825.435	36.787.969	70,98
	02732 - NANGGELENG	51.825.435	36.787.969	
	Set laboratorium	63.312.850	35.169.250	55,55
	02732 - NANGGELENG	63.312.850	35.169.250	



Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2022

NO	SUB BIDANG/ MENU KEGIATAN/ DETAIL KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	%
6	2	3	4	5
I.5	KEFARMASIAN	2.265.937.675	1.145.982.859	
	Penyediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	2.265.937.675	1.145.982.859	
	Penyediaan obat esensial untuk pelayanan kesehatan primer	1.659.258.238	1.077.249.459	64,92
	Penyediaan BMHP untuk pelayanan kesehatan primer	606.679.437	68.733.400	11,33
	II. DAK NON FISIK	10.342.370.000	8.461.646.000	81,82
II.1	UKM Esensial 75-90%	738.729.000	724.629.000	98,09
	Upaya Penurunan AKI-AKB	84.360.000	83.975.000	99,54
	Upaya Percepatan perbaikan gizi masyarakat	65.340.000	65.340.000	100,00
	Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	201.169.000	201.169.000	100,00
	Upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit	248.310.000	234.595.000	94,48
	Akselerasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	120.000.000	120.000.000	100,00
	Upaya Kesehatan Lanjut Usia	16.690.000	16.690.000	100,00
	Upaya Penyehatan Lingkungan	2.860.000	2.860.000	100,00
II.2	COVID-19 10-25%	200.000.000	191.280.000	95,64
	Peningkatan kapasitas bagi petugas pelacakan kontak /tracer	164.000.000	155.280.000	94,68
	Honor pengolah data kasus Covid-19 bagi petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota	36.000.000	36.000.000	100,00
II.3	Akreditasi Puskesmas	529.100.000		
	Survei Akreditasi Puskesmas	529.100.000		
II.4	Distribusi Obat, vaksin dan BMHP dari Kab/Kota ke Puskesmas	106.826.000	106.381.000	99,58
	Biaya distribusi Obat, Vaksin Dan BMHP	106.826.000	106.381.000	99,58
	BOK PUSKESMAS	8.474.815.000	7.374.622.000	87,02
	UKM Essensial	7.065.362.200	6.653.429.000	94,17
II.5	Upaya Penurunan AKI, AKB	1.168.075.000	1.142.660.000	97,82
	Surveilans Kesehatan Ibu dan Bayi	162.640.000	160.560.000	98,72
	Gerakan Perempuan Pekerja Sehat Produktif (GP2SP)	11.910.000	11.910.000	100,00
	Peningkatan Mutu Layanan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Puskesmas dan Rumah Sakit	28.020.000	19.505.000	69,61
	Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui UKBM dalam upaya penurunan AKI AKB terintegrasi dengan upaya perbaikan gizi masyarakat	125.885.000	123.935.000	98,45
	Pemeriksaan Kesehatan, Pemberian Tablet Tambah Darah, Edukasi Gizi Seimbang, dan Pendidikan Kespro Pada Anak Usia ekolah dan Remaja	448.820.000	439.720.000	97,97
	Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS)	37.730.000	35.780.000	94,83
	Program Perencanaan dan Pencegahan Komplikasi Terintegrasi Desa Siaga	83.465.000	82.425.000	98,75
	Pelaksanaan Kelas Ibu (Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita)	158.780.000	158.000.000	99,51
	Pendampingan ibu hamil, ibu nifas, dan bayi (termasuk pemantauan faktor risiko/ komplikasi), oleh kader/ mahasiswa/ fasilitator/ tenaga lainnya	110.825.000	110.825.000	100,00



Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2022

NO	SUB BIDANG/ MENU KEGIATAN/ DETAIL KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	%
6	2	3	4	5
II.6	Upaya Perbaikan gizi masyarakat	1.218.038.000	1.179.073.000	96,80
	Surveilans Gizi	715.675.000	681.685.000	95,25
	Pemantauan Tumbuh Kembang Balita	208.877.000	205.267.000	98,27
	Pemeriksaan dan Pengawasan Kualitas Air dan Sanitasi Dasar	293.486.000	292.121.000	99,53
II.7	Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	366.725.200	343.330.000	93,62
	Penggerakkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	138.680.000	131.035.000	94,49
	Pelaksanaan Gernas, Aktifitas Fisik, Pemeriksaan Kesehatan Berkala, dan Edukasi Gizi Seimbang di tingkat Kecamatan/ wilayah Puskesmas	109.506.000	100.620.000	91,89
	Kampanye lokal dalam mendukung pelaksanaan Gernas	20.900.200	20.885.000	99,93
	Upaya Kesehatan Olahraga	97.639.000	90.790.000	92,99
II.8	Upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit	1.224.993.000	1.155.594.000	94,33
	Surveilans Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) pelaksanaan imunisasi	12.740.000	11.830.000	92,86
	Validasi sasaran, hasil cakupan imunisasi dan Rapid Convinience Assessment (RCA)	19.140.000	18.620.000	97,28
	Verifikasi rumor dugaan KLB	5.815.000	3.315.000	57,01
	Pengambilan dan Pengiriman spesimen penyakit berpotensi KLB ke laboratorium kesehatan daerah atau laboratorium rujukan pemerintah di kab/kota	5.395.000	3.055.000	56,63
	Pelacakan kasus Kronis atau kasus ikutan atau hasil reaksi minum obat pada Pemberian Obat Pencegah Masal (POPM).	15.210.000	7.995.000	52,56
	Penyelidikan Epidemiologi (PE) penyakit potensi KLB dan penanggulangan KLB.	13.715.000	13.195.000	96,21
	Analisa hasil Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan diseminasi informasi di wilayah kerja puskesmas.	3.665.000	3.145.000	85,81
	Pelacakan kontak kasus KLB	7.150.000	6.435.000	90,00
	Surveilans Penyakit Tidak Menular (PTM) dan penyakit berpotensi KLB termasuk Penyakit Infeksi Emerging (PIE) di masyarakat	12.805.000	12.090.000	94,42
	Survei anak sekolah dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit	23.970.000	23.970.000	100,00
	Validasi sasaran, hasil cakupan GME, Depresi, ODGJ Berat, Penyalahgunaan Napza dan Bunuh Diri	25.460.000	25.460.000	100,00
	Deteksi dini kasus HIV/AIDS, TBC, Hepatitis, Malaria dan penyakit menular lainnya pada Ibu hamil dan kelompok berisiko.	25.400.000	25.400.000	100,00
	Deteksi dini faktor risiko PTM di posbindu PTM dan Posyandu lansia.	71.895.000	71.827.000	99,91
	Penemuan kasus PD3I, kasus kontak TB dan kasus mangkir, kasus kontak kusta serta orang dengan gangguan jiwa serta penyakit lainnya.	105.935.000	98.390.000	92,88
	Kunjungan ulang kasus Acute Flaccyd Paralysis (AFP).	4.160.000	2.525.000	60,70
	Konseling dan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan napza.	9.705.000	9.555.000	98,45
	Pelaksanaan pelayanan imunisasi baik imunisasi rutin, pengenalan antigen baru, imunisasi tambahan, maupun kegiatan defaulter tracking.	223.920.000	198.455.000	88,63
	Sosialisasi pelaksanaan imunisasi rutin kepada orangtua dan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) kepada guru dan wali murid.	34.090.000	31.360.000	91,99
	Pemberian Obat Pencegah Masal (POPM) untuk pencegahan penyakit.	142.015.000	141.982.000	99,98



Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2022

NO	SUB BIDANG/ MENU KEGIATAN/ DETAIL KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	%
6	2	3	4	5
	Advokasi/sosialisasi/lokakarya/rapat koordinasi Lintas Sektor (LS)/ Lintas Program (LP) terkait pencegahan dan pengendalian penyakit.	18.760.000	18.760.000	100,00
	Pendataan sasaran POPM.	58.045.000	58.045.000	100,00
	Pengambilan obat POPM ke dinas kesehatan kabupaten/kota.	2.665.000	2.665.000	100,00
	Sweeping untuk meningkatkan cakupan POPM, imunisasi dan penyakit menular lainnya.	8.580.000	8.580.000	100,00
	Pengendalian vektor nyamuk (Pemberantasan Sarang Nyamuk, larvasidasi, fogging, Indoor Residual Spraying (IRS), modifikasi lingkungan).	14.860.000	11.440.000	76,99
	Pemantauan jentik secara berkala.	97.573.000	97.555.000	99,98
	Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk Desa Tanpa Asap Rokok	31.480.000	31.480.000	100,00
	Pelatihan petugas konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Puskesmas bagi kader kesehatan masyarakat.	32.770.000	32.770.000	100,00
	Monitoring, bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan pos pembinaan terpadu (posbindu) penyakit tidak menular oleh petugas puskesmas.	23.170.000	23.170.000	100,00
	Pengendalian faktor risiko lainnya yang dapat menimbulkan penyakit pada situasi KLB, situasi khusus dan bencana.	6.325.000	3.780.000	59,76
	Pelaksanaan Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial pada Bencana	1.040.000	845.000	81,25
	Pendampingan penderita penyakit menular menahun dan penyakit tidak menular	10.465.000	10.465.000	100,00
	Validasi data laporan hasil POPM dan manajemen kasus filariasis.	22.915.000	22.850.000	99,72
	Kunjungan rumah untuk tatalaksana/manajemen kasus filariasis.	5.330.000	2.795.000	52,44
	Follow up tatalaksana dan pencegahan cacat kasus kusta dan penyakit menular lainnya serta gangguan jiwa.	7.605.000	7.085.000	93,16
	Pendampingan rujukan kasus gangguan jiwa dan napza	7.605.000	5.330.000	70,09
	Orientasi/pembekalan/peningkatan kapasitas SDM bagi kader kesehatan untuk peningkatan P2P.	55.980.000	52.520.000	93,82
	Koordinasi terpadu lintas program/lintas sektor tentang pencegahan dan pengendalian penyakit tingkat puskesmas	57.640.000	56.855.000	98,64
II.9	STBM Desa/ Kelurahan Prioritas	7.500.000	-	-
	Pemcuan 5 pilar STBM	4.040.000	-	-
	Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi Perilaku Kesehatan	1.010.000	-	-
	Monitoring paska pemucuan Pembuatan dan update peta sanitasi dan buku kader	780.000	-	-
	Verifikasi desa stop buang air besar sembarangan (SBS)	1.670.000	-	-
II.10	Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja	1.735.992.000	1.495.739.000	86,16
	Penyediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja	1.735.992.000	1.495.739.000	86,16
II.11	Akselerasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	381.290.000	381.290.000	100,00
	Pelaksanaan kunjungan keluarga dan intervensi awal dalam rangka deteksi dini dan pengelolaan masalah kesehatan terintegrasi melalui pendekatan keluarga	155.935.000	155.935.000	100,00
	Pelaksanaan intervensi lanjut termasuk Perkesmas dalam rangka intervensi hasil PIS-PK	225.355.000	225.355.000	100,00



NO	SUB BIDANG/ MENU KEGIATAN/ DETAIL KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	%
6	2	3	4	5
II.12	Fungsi Manajemen Puskesmas (P1, P2, P3)	672.000.000	670.635.000	99,80
	Lokakarya mini dalam rangka penguatan perencanaan (P1), penggerakan pelaksanaan (P2), pengawasan pengendalian dan penilaian (P3) kinerja Puskesmas serta kegiatan koordinasi lintas sektor lainnya.	672.000.000	670.635.000	99,80
II.13	Upaya Kesehatan Lanjut Usia	290.749.000	285.108.000	98,06
	Pelatihan Caregiver Informal oleh puskesmas	290.749.000	285.108.000	98,06
II.14	COVID-19 35-40%	1.409.452.800	721.193.000	51,17
	Pelacakan kontak dan Pemantauan harian selama karantina dan/ atau isolasi oleh tracer dan/atau petugas puskesmas	783.517.000	414.843.000	52,95
	Biaya Komunkasi Pelacakan kontak dan Pemantauan	21.400.000	10.500.000	49,07
	Honor Pengolah data kasus Covid-19 di puskesmas	360.000.000	178.200.000	49,50
	Biaya Komunikasi untuk pengolah data puskesmas	4.300.000	2.200.000	51,16
	Penyelidikan Epidemiologi kasus Covid-19	198.091.800	100.945.000	50,96
	Pengiriman spesimen suspect dan kontak erat COVID-19 ke laboratorium kesehatan daerah atau laboratorium rujukan pemerintah di kab/kota	42.144.000	16.705.000	39,64
II.15	BOK STUNTING	64.734.000	64.734.000	
	Pengukuran dan publikasi stunting	61.984.000	61.984.000	100,00
	Pengukuran dan publikasi stunting	61.984.000	61.984.000	100,00
	Pencatatan dan Pelaporan (termasuk dokumentasi) intervensi dan hasil	2.750.000	2.750.000	100,00
	Pencatatan dan Pelaporan (termasuk dokumentasi) intervensi dan hasil	2.750.000	2.750.000	100,00
II.16	JAMPERSAL	228.166.000	-	
	Jampersal	228.166.000	-	
	Rujukan persalinan dan neonatal (biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi)	228.166.000	-	

Alokasi dan Realisasi Anggaran Bersumber Bantuan Provinsi Jawa Barat

Dinas Kesehatan Kota Sukabumi pada Tahun 2022 ini mendapat alokasi dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 7.758.897.517,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.554.239.717,- atau sebesar 84,47%. Anggaran Bantuan Keuangan tersebut digunakan Jaminan Kesehatan bagi penerima Bantuan Iuran PBI Prov. Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya mengenai alokasi dan realisasi kegiatan bersumber Bantuan Keuangan Propinsi Jawa barat dapat dilihat dari tabel dibawah.



Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Sukabumi
Bersumber Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2021

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	%
1	2	3	4	5
1	1.02.02.2.02.26 Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	7.758.897.517	6.554.239.717	84,47%
JUMLAH		7.758.897.517	6.554.239.717	84,47%

Dari uraian diatas secara umum dapat disimpulkan tingkat realisasi dan penyerapan anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2022 dari 4 (empat) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 80 (delapan puluh) sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Berkategori baik (realisasi 80%-100%): 4 program (100%), 16 kegiatan (94,12 %) dan 75 sub kegiatan (93,75%);
- b. Berkategori cukup baik (realisasi 60%-80%) : 2 sub kegiatan (2,5%);
- c. Berkategori kurang baik (<60%) : 1 kegiatan (6,25 %) dan 3 sub kegiatan (3,75%).

Tingkat penyerapan total anggaran belanja langsung Dinas Kesehatan Tahun 2022 adalah sebesar 96,84% atau kategori Baik dan mengalami peningkatan sebesar 1,8% dari penyerapan anggaran tahun 2021 (95,04%).

Agar penyerapan anggaran dan pencapaian kinerja berjalan sesuai harapan maka di tahun yang akan datang, upaya dan langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan penganggaran fokus pada program prioritas yang bisa dilakukan oleh semua bidang atau bagian terkait sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara kolaborasi;
2. Kegiatan pengadaan terutama konstruksi yang menggunakan metode lelang harus dilakukan pada awal tahun, supaya punya waktu yang cukup untuk pelaksanaannya



3. Perencanaan program dan kegiatan rutin harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan selama satu tahun anggaran agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
4. Pengendalian dan evaluasi dilakukan lebih baik lagi, dengan menggunakan sistem informasi disertai kunjungan lapangan.

Realisasi tingkat penyerapan anggaran terkait dengan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis disajikan tersendiri dalam lampiran 7 (tujuh) laporan ini.

3.5 Evaluasi dan Analisis Efisiensi dan Efektifitas Kegiatan

Dinas Kesehatan pada Tahun 2022 telah melaksanakan berbagai kegiatan dari berbagai sumber anggaran, untuk mengukur kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dilakukan evaluasi dan analisis dengan efisiensi dan efektifitas dari kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022 tersebut.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi umumnya ditandai dengan adanya penghematan penggunaan dana pada input dalam menghasilkan output. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran efisiensi adalah sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas dilakukan dengan cara membandingkan antara outcome dengan outputnya baik rencana maupun realisasinya. Efektifitas umumnya ditandai dengan berfungsinya seluruh output pada tingkat outcome. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Adapun standar pencapaian tingkat efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan adalah sebagai berikut :

- > 100% = Efisien/Efektif
- < 100% = Inefisien/Inefektif
- = 100% = Sesuai harapan

Berikut hasil evaluasi dan analisis efisiensi dan efektifitas program/ kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2022 :

Tabel 3.18
Analisis Efisiensi dan Efektifitas Kegiatan Pada
Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 202

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	% Efisiensi	% Efektifitas	Keterangan
1	2	3	4	5
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	102,07	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	100	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00	100	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100,00	100	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100,00	100	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00	100	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	100	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,85	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100,85	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100,00	100	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100,00	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	140,54	100	efisien dan efektif sesuai harapan



Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	% Efisiensi	% Efektifitas	Keterangan
1	2	3	4	5
1.02.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	175,25	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	112,68	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,00	100	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	101,32	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	101,32	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,65	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,30	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101,33	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,93	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,00	100	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,83	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,18	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106,82	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	100	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118,42	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102,53	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105,70	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102,32	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103,26	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101,05	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,03	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	102,33	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	102,33	100	efisien dan efektif sesuai harapan
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	109,75	100	efisien dan efektif sesuai harapan



Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	% Efisiensi	% Efektifitas	Keterangan
1	2	3	4	5
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	111,70	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	100,68	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100,65	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya	100,36	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100,75	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	124,11	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	108,10	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	128,53	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	109,94	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	108,55	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	100,42	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	109,57	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	101,81	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	187,05	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	104,78	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	101,73	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	101,58	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	102,22	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	101,71	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,00	100	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	103,26	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	105,76	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100,00	100	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	143,45	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	101,55	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	106,15	100	efisien dan efektif sesuai harapan



Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	% Efisiensi	% Efektifitas	Keterangan
1	2	3	4	5
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	102,09	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100,67	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	100,00	100	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	110,22	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	106,22	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	100,00	100	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	101,63	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	104,76	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	106,96	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100,00	100	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100,96	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	110,96	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	200,00	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	104,21	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	103,14	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	100,00	100	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	102,90	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	102,33	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	103,33	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	100,31	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102,60	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	100,00	100	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	104,06	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	105,04	100	efisien dan efektif sesuai harapan



Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	% Efisiensi	% Efektifitas	Keterangan
1	2	3	4	5
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	100,00	100	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	113,67	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	113,91	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	113,85	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	114,66	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100,52	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	104,82	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	104,82	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	100	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100,00	100	efektif sesuai harapan dan efisien sesuai harapan
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,03	100	efisien dan efektif sesuai harapan
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100,03	100	efisien dan efektif sesuai harapan
TOTAL		103,16	100	efisien dan efektif sesuai harapan

Dari tabel 3.18 dapat dilihat bahwa berdasarkan perhitungan efisiensi dan efektifitas sub kegiatan dari 80 sub kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:



- a. Sebanyak 61 sub kegiatan, efisien dan efektif sesuai harapan (76,25%) artinya target output dan outcome tercapai sesuai harapan dengan efisiensi penggunaan anggaran;
- b. Sebanyak 19 sub kegiatan, efisien sesuai harapan dan efektif sesuai harapan (23,75%), artinya target output dan outcome yang tercapai dengan penyerapan anggaran optimal;



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi serta sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan kepada Pemerintah Kota Sukabumi.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi pada tahun 2022 digambarkan dari pencapaian sasaran utama Dinas kesehatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja pada indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, semuanya dapat terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan.

Pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas kesehatan Kota Sukabumi sebagai Organisasi Perangkat Daerah bidang kesehatan terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem kesehatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 1 Tahun 2015 belum optimal dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dalam upaya menangani masalah masalah kesehatan perlu dukungan dari lintas sektor berupa kegiatan kegiatan yang inovatif dan kolaboratif.
2. Belum optimalnya koordinasi antar lintas program dalam hal perencanaan kegiatan, sehingga masih ditemukan kegiatan – kegiatan yang bersifat rutin dan belum fokus terhadap pencapaian indikator kinerja;
3. Belum optimalnya koordinasi dengan lintas sektor terkait peningkatan pencapaian indikator kinerja utama, sehingga kegiatan ditemukan masih parsial dan belum sinergis
4. Masih rendahnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terutama dalam upaya promotif dan preventif;



5. Kurangnya alokasi anggaran sarana, prasarana dan alat untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit yang saat ini telah menjadi penyebab kematian tertinggi;
6. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan SDM kesehatan dalam menangani masalah kesehatan di lapangan terutama diluar kompetensi akademiknya.

Dari kendala/ permasalahan yang dihadapi tersebut, diperlukan strategi-strategi untuk mengatasinya sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan perubahan sistem kesehatan daerah yang ada sekarang dengan memperhatikan perkembangan kondisi saat ini dan yang akan datang dengan memanfaatkan teknologi dan lebih melibatkan semua komponen masyarakat sehingga dapat mendukung pembangunan kesehatan di daerah dan dapat beradaptasi dengan kondisi kesehatan terburuk seperti pandemi saat ini.
2. Perlu diupayakan berbagai program kesehatan yang lebih inovatif, kolaboratif dan lebih berdaya ungkit besar terhadap capaian kinerja dengan melibatkan sektor lain sehingga timbul sinergitas program/ kegiatan untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang ada terutama dalam hal pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dan indikator kinerja utama;
3. Meningkatkan peran serta sektor terkait, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan program-program kesehatan;
4. Memfokuskan program dan kegiatan terhadap upaya promotif dan preventif melalui pemberdayaan masyarakat;
5. Menggali anggaran dari sektor swasta (CSR) untuk lebih meningkatkan kegiatan yang bersifat promotif/ preventif terutama untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
6. Meningkatkan perhatian terutama dari segi pembiayaan terhadap kasus penyakit tidak menular.

Demikian, gambaran mengenai akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kota Sukabumi pada tahun 2022 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan



kebijakan yang telah ditetapkan, serta kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas berikut strategi pemecahan masalahannya, semoga bermanfaat bagi perencanaan kinerja di tahun yang akan datang.



LAMPIRAN - LAMPIRAN



P E M E R I N T A H K O T A S U K A B U M I

D I N A S K E S E H A T A N

Jln. Suryakencana No.45 Telp (0266) 221213. Telp/Fax (0266) 221931–Sukabumi 43114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI

NOMOR : 57 TAHUN 2019

TENTANG :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI
TAHUN 2019 - 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik.
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan Instrumen pertanggungjawaban dan sebagai tolok ukur penilaian Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2019 - 2023 yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3);
7. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 32).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 – 2023
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2019 - 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 13 Mei 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SUKABUMI



dr. Hj. RITANENNY E.S.M., MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19591108 198511 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI
 NOMOR : TAHUN 2019
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI
 TAHUN 2019 – 2023

- 1. Nama Unit Organisasi** : Dinas Kesehatan Kota Sukabumi
- 2. Tugas** : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan
- 3. Fungsi** :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan
 - 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang kesehatan

4. Indikator Kinerja Utama

No	Uraian	Alasan	Sumber Data
1.	Indeks Keluarga Sehat	Program Prioritas Nasional dan merupakan Indikator lintas program	Laporan pendataan dan intervensi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)

5. Perhitungan Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Perhitungan
1.	Indeks Keluarga Sehat	Adalah angka/ derajat tingkat kesehatan keluarga yang ditinjau dari 12 indikator kesehatan	Jumlah indikator keluarga sehat yang bernilai 1 dibagi (12-jumlah indikator yang tidak ada di keluarga)

6. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 - 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun					Akhir Periode
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0.207	0.257	0.287	0.317	0.367	0.417

Sukabumi, Mei 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SUKABUMI



dr. Hj. RITANENNY E.S.M., MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19591108 198511 2 001

Tabel 7.1 (T.C 28)**Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Indikator Kinerja Utama										
1	Angka Harapan Hidup	Angka	71.95	72.00	72.05	72.10	72.15	72.20	72.25	72.25
2	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0.177	0.177	0.207	0.257	0.287	0.317	0.367	0.367

Sumber : Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Tahun 2018 - 2023, 2018

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS KESEHATAN
Jl.Suryakencana No. 41 Kota Sukabumi**



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA SUKABUMI
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Rita Fitrianiingsih, M.Kes.
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ACHMAD FAHMI
Jabatan : Walikota Sukabumi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukabumi, Januari 2022

Pihak Kedua,
WALIKOTA SUKABUMI,


H. ACHMAD FAHMI

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SUKABUMI,**



dr. RITA FITRIANINGSIH, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19640223 199010 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KESEHATAN
KOTA SUKABUMI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
1	2	3		4	
1	Mewujudkan keluarga sehat	1	Persentase Keluarga Sehat	31,7	%
2	Terwujudnya keluarga sehat yang mandiri	2	Persentase peningkatan capaian keluarga sehat	4	%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	52.650.551.062	APBD Kota Sukabumi, DAK Fisik, DAK Non Fisik, DBH, Pajak Rokok, Kapitasi JKN, Non Kapitasi JKN
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.907.263.750	APBD Kota Sukabumi, DAK Non Fisik
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.342.394.575	APBD Kota Sukabumi,
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	378.715.354.725	APBD Kota Sukabumi, BLUD
JUMLAH		434.615.564.112	

Sukabumi, Januari 2022

Pihak Kedua,
WALIKOTA SUKABUMI,


H. ACHMAD FAHMI

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SUKABUMI,



dr. RITA FITRIANINGSIH, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19640223 199010 2 011